



Upaya Pengentasan Kemiskinan Berbasis Wilayah

■ Yulianingsih

TKPK Kota Yogyakarta akan melakukan pendampingan terhadap TKPK 45 kelurahan.

YOGYAKARTA — Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk menekan angka kemiskinan. Ditargetkan, hingga akhir 2016 mendatang, angka kemiskinan di wilayah ini dapat turun hingga sekitar 8,4 persen.

Selain peningkatan program pengentasan kemiskinan, pemkot melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) setempat melakukan desentralisasi program untuk penanggulangan dan pengentasan kemiskinan ini. Desentralisasi dilakukan agar lebih mengena sesuai kebutuhan masyarakat miskin di wilayah sehingga program yang ada lebih implementatif di lapangan.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Sri Adiyanti yang juga pengurus TKPK Kota

Yogyakarta, Selasa (12/5). Ia menjelaskan, saat ini angka kemiskinan di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi yaitu 8,8 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 410 ribu jiwa.

"Mulai tahun ini, penanggulangan kemiskinan dilakukan berbasis wilayah atau desentralisasi langsung di setiap kelurahan melalui TKPK kelurahan," ujar dia.

Terkait implementasi program, lanjutnya, TKPK Kota Yogyakarta akan melakukan pendampingan terhadap TKPK 45 kelurahan. Selanjutnya, pada 2016 pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program TKPK tingkat kelurahan.

Saat ini, papar dia, setiap kelompok kerja TKPK Kota Yogyakarta tengah menyusun standar operasional program sebagai panduan kinerja TKPK kelurahan. Dicontohkan, Pokja Kemitraan telah membangun sistem komunikasi di wilayah dalam kemitraan dengan pengusaha dan potensi lain yang bisa dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan di wilayah.

Ia mengatakan pokja tersebut juga menyusun modul prosedur penyelesaian masalah di wilayah termasuk pemberdayaan masyarakat yang afirmatif gender. Pokja lain yakni bantuan

sosial membuat modul tentang pemetaan keluarga miskin dan permasalahannya, pokja pemberdayaan masyarakat membuat standar operasional berbasis potensi wilayah dan sebagainya.

Menurutnya, masing-masing pokja ini akan melakukan pendampingan terhadap TKPK kelurahan. Anggota TKPK di wilayah, imbuhnya, juga cukup memadai untuk melaksanakan program tersebut secara langsung.

Pasalnya, seperti disampaikan Sri, anggota TKPK kelurahan merupakan



tokoh masyarakat dan penggiat sosial di wilayah sehingga tahu persis permasalahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah. Melalui kebijakan ini diharapkan penanggulangan kemiskinan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.

Pendataan bersama BPS

Selain pengentasan kemiskinan melalui desentralisasi di keturahan, tahun ini pemkot bersama Badan Pusat Statistik (BPS) diminta untuk melakukan pendataan keluarga miskin sebagai basis data terpadu (BDT) 2015 oleh pemerintah. BDT akan dipergunakan sebagai sumber data tunggal bagi berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah pusat melalui program perlindungan sosial (PPLS).

Ketua Pokja Data dan Informasi TKPK Kota Yogyakarta, Prihantini, mengatakan setidaknya ada 40 persen golongan ekonomi ke bawah dari total jumlah penduduk di Kota Yogyakarta yang akan masuk dalam data ini. Jumlah itu jelas melebihi jumlah penduduk pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) di Kota Yogyakarta. "Pemegang KMS harapannya akan masuk dalam data ini sebagai calon penerima program PPLS dari pemerintah pusat," ujarnya.

Indikator pendataan dilakukan melalui beberapa aspek, antara lain, sosial, ekonomi, kesehatan, sarana prasarana (lingkungan), disabilitas, dan sebagainya.

Saat ini, kata dia, pihaknya sudah melakukan rekrutmen anggota Forum Konsultasi Publik (FKP) yang akan menjadi fasilitator pendataan di setiap kelurahan.

Setidaknya, sebanyak 25 anggota FKP yang berhasil direkrut dalam program ini. Ia mengatakan rekrutmen dilakukan secara tertutup karena anggota forum ini merupakan orang yang terbiasa terjun di masyarakat dalam bidang sosial. "Anggota yang kita pilih memang benar-benar yang sudah berpengalaman," kata dia.

Anggota forum dipilih dari tenaga sukarela kecataman, kader pemberdayaan masyarakat, petugas sosial masyarakat, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi. Pendataan akan dilakukan pada Juni-Juli 2015, pengolahan data dilakukan November 2015, dan data keseluruhan diserahkan ke pusat Desember 2015.

Menurut dia, data ini akan digunakan sebagai sumber pemberian program PPLS baik melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), PKH, Pembagian Beras Miskin, Kartu Perlindungan Sosial, dan sebagainya.

Dikatakan Sri Adiyanti melalui pendataan bersama BPS dan program desentralisasi penanggulangan kemiskinan di wilayah, maka pengentasan kemiskinan di Yogyakarta diyakini bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Sehingga target 8,4 persen di 2016 diyakini akan tercapai dengan baik. ■ ed | yusuf assidiq

SIM Kemiskinan Terpadu Disusun

YOGYAKARTA — TKPK Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Bagian Teknologi dan Telekomunikasi Setda Kota Yogyakarta membangun sistem informasi terpadu terkait data kemiskinan. Langkah ini untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan berbasis kewilayahan.

Sistem informasi terpadu ini akan menyajikan data *by name by address* penduduk miskin di Kota Yogyakarta termasuk riwayat penanggulangan kemiskinan yang sudah diterima oleh keluarga yang bersangkutan.

Menurut Sekretaris Bappeda Kota Yogyakarta dan TKPK setempat, Sri Adiyati, SIM terpadu ini dibutuhkan agar *treatment* atau penanggulangan kemiskinan sesuai kebutuhan warga. Selain itu agar warga yang bersangkutan tidak mendapatkan *treatment* itu-itu saja. "Ada istilah *L4, lo lagi lo lagi* jika ada warga yang ikut apa saja pelatihan pengentasan kemiskinan. Nah dengan sistem ini tidak akan ada istilah itu lagi," ujarnya.

SIM kemiskinan ini akan mengadopsi data dari rapor keluarga yang dibagikan TKPK ke setiap warga miskin di Kota Yogyakarta. Rapor keluarga ini berisi riwayat hidup keluarga yang bersangkutan, pernah mengikuti program apa, mendapat bantuan apa, dan kondisi keluarga saat ini. "Jika ternyata sudah

mengikuti berbagai pelatihan tetap saja miskin berarti harus ada *treatment* lain. Dan ini bisa kita lihat dari SIM ini," ujarnya.

Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIT) Setda Kota Yogyakarta, Sukadarisman mengatakan penyusunan SIM kemiskinan terpadu akan dilakukan pihak ketiga. "Saat ini akan masuk pelelangan, dan ini bertahap," ujarnya.

Dikatakan pihaknya hanya bertugas menyediakan rumah atau website terkait SIM tersebut. Entry data dan administrasinya ada di Bappeda Kota Yogyakarta. Data ini, kata dia, bisa diakses oleh semua SKPD di Kota Yogyakarta. Sehingga jika SKPD akan melakukan program pengentasan kemiskinan sesuai program yang ada tinggal melihat data di SIM tersebut.

"SIM ini akan menampilkan data berapa keluarga yang membutuhkan pelatihan bengkel, batik, dan sebagainya. Sehingga SKPD bisa langsung tahu berapa warga yang akan menjadi sasaran program tersebut," katanya.

Menurut Sukadarisma, SIM ini akan selesai akhir 2015, namun akan terus diperbaiki sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan. Basis data yang digunakan selain KMS juga data PPLS hasil pemutakhiran 2015. ■ yulianingsih ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005